

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah sudah tidak terdengar asing lagi di pemerintahan Indonesia. Otonomi daerah diberlakukan sejak 1999 dengan disahkannya UU No 05 tahun 1974 (Pemerintah Republik Indonesia 1974), otonomi daerah sudah mulai diperkenalkan namun masyarakat baru mulai merasakan dampaknya 2014 melihat implementasi UU No 23 tahun 2014 berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Sesuai UU No 23 tahun 2014, Otonomi daerah merupakan hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan dan kepentingan pemerintahannya sendiri lingkungan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah RI 2014). Otonomi daerah adalah pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada daerah terkait dengan sumber daya sesuai dengan potensi daerah. (Savilia 2021)

Saat ini, otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan daerah kekuasaan untuk menjalankan dan mengendalikan segala urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, Efektivitas dan transparansi sektor publik Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur, Bupati, atau Walikota dan pemerintah daerah untuk merencanakan dan menangani urusan pemerintah mereka sendiri berdasarkan konsep tugas pembantuan dan otonomi. Orang yang berwenang dalam lingkup lokal melaksanakan otonomi seluas-luasnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing di daerah. Menggugat pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, seperti keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, persamaan hak, dan keseimbangan hak kewajiban. (Tamba 2021)

Instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sektor publik dan memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat, biasanya diharapkan untuk tampil di tingkat tertinggi baik untuk kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat. Salah satu elemen kunci dalam membangun keberhasilan organisasi adalah kinerja. Kinerja didefinisikan sebagai keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai dalam kaitannya dengan pemanfaatan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendari) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 No. 37 (BPK 2006). Kinerja adalah faktor yang harus dipahami dan dibagikan kepada pihak-pihak tertentu untuk menilai seberapa baik kinerja suatu lembaga dalam kaitannya dengan visi yang diambil. Dengan begitu, adanya pengetahuan tentang kinerja suatu instansi pemerintah akan memudahkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, seperti menilai kebijakan kepemimpinannya. Agar suatu organisasi lebih mudah mencapai tujuan yang ditetapkan, karyawan di agensi biasanya diharapkan berkinerja dengan baik.(Dewi 2021)

Perkembangan otonomi daerah saat ini menuntut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terus meningkatkan pelayanan masyarakat seiring dengan berkembangnya otonomi daerah. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah badan atau lembaga di lingkungan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Setiap daerah membentuk perangkat daerah yang dipimpin oleh kepala satuan kerja sebagai pengguna anggaran/pengguna barang, yang menjadi pusat akuntabilitas pembangunan daerah berdasarkan evaluasi karakteristik,dan potensi,.

Pada penelitian ini subjek yang diambil yaitu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu organisasi dengan tanggung jawab utama melayani masyarakat dan mengutamakan kinerja sebagai kunci keberhasilan merupakan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Kinerja instansi pemerintah daerah mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari visi, misi atau strategi instansi tersebut sesuai dengan program dan

kebijakan yang telah ditetapkan (Menteri Keuangan RI n.d.). Kinerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa baik suatu program, kegiatan, atau kebijakan telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi (Bastian 2006). Keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan jumlah dan kualitas yang terukur dianggap sebagai kinerja, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 (Peraturan Pemerintah RI 2006). Efektivitas aparatur atau manajerial memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja sektor publik. (Dewa Putu 2021)

Pemerintah daerah harus senantiasa tanggap terhadap tuntutan dari lingkungan yang lebih tinggi dengan menawarkan pelayanan yang terbaik, transparan, dan berkualitas, karena merupakan organisasi di sektor publik dan harus melaksanakan tuntutan yang berorientasi pada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Atas perintah yang telah diberikan kepada mereka, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkannya. Artinya, kinerja masing-masing instansi pemerintah daerah ditonjolkan karena mengawasi semua perencanaan pemerintah sekaligus

Fenomena yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terkait indeks pelayanan publik. Berdasarkan Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/3420/PC.01.04/XI/2019 perihal hasil penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dari 64 produk layanan administrasi diperoleh nilai 78,84 dan masuk dalam Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang. Ombudsman akan terus melakukan penilaian, hingga nantinya tiap kabupaten berada pada zona hijau. Penilaian berkala dilakukan per tahun, hingga terpenuhinya standar pelayanan publik minimal. Selain itu, Ombudsman akan menilai kepuasan layanan yang dirasakan masyarakat (Peraturan Bupati Lampung Tengah 2020)

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan keuangannya adalah anggaran. Anggaran berperan penting dalam meningkatkan efektivitas manajerial.

Anggaran diperlukan bagi entitas pemerintah untuk mencapai tujuan mereka dengan baik. Pertimbangan harus diberikan untuk keterlibatan dalam perumusan anggaran. Anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja akan menghambat rencana yang telah dibuat, sehingga partisipasi dalam penganggaran sangat penting.

Faktor penyebab dari kinerja yaitu Perilaku organisasi adalah salah satu yang mungkin berdampak pada seberapa baik kinerja organisasi pemerintah. Untuk menerapkan pengetahuan guna meningkatkan keberhasilan organisasi, studi tentang perilaku organisasi mengkaji dampak yang dimiliki individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi (Stephen and Timothy A 2017). Studi yang berbeda tentang pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah telah dilakukan oleh (solichin 2015) Temuan menunjukkan faktor perilaku organisasi berpengaruh pada sistem akuntansi keuangan daerah.

Selain keperilakuan organisasi, kinerja juga dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja individu itu sendiri, di samping dedikasi organisasi. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi dalam bekerja akan menggerakkan organisasi menjadi lebih baik. (Sembiring and Tanjung 2021) menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Semakin tinggi tingkat motivasi yang dimiliki oleh individu maka kinerjanya juga akan meningkat.

Adapun hal lain yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah yaitu pengendalian internal. Menurut (Peraturan Pemerintah RI 2008), sistem Pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses dimana segala kegiatan atau tindakan secara terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh jajarannya dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang menerapkan konsep value for money, pengamanan aset negara, dan bentuk (Peraturan Pemerintah RI 2008). Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Itu ada. Pengelolaan keuangan yang disalurkan melalui tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang transparan dan akuntabel dapat mewujudkan sistem pengendalian intern yang baik.(Yunita 2022)

Terdapat penelitian sebelumnya telah meneliti bagaimana pengendalian internal mempengaruhi kinerja pegawai di organisasi sektor publik. Salah satu faktor yang diteliti dianggap berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian internal instansi pemerintah. Namun, terdapat peneliti mendapatkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi pemerintah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yunita 2022), memperoleh hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi sektor publik. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Dewi 2021), dan diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah yaitu kejelasan sasaran anggaran. Menurut (Mardiasmo 2009) anggaran yang baik berisi informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, tetapi juga berfungsi sebagai perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam istilah keuangan. Argumen-argumen ini mengarah pada kesimpulan bahwa tujuan anggaran yang diungkapkan secara spesifik, jelas, dan sederhana adalah target anggaran. Terdapat penelitian terdahulu mengenai kejelasan sasaran anggaran, salah satunya yang dilakukan oleh (Dewi 2021), dengan judul *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi, Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan Instansi Pemerintah* memperoleh hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti topic mengenai kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian (Dewi 2021) yang berjudul *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi, Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)*". Perbedaan penelitian ini dengan replikasi sebelumnya merupakan penambahan variabel independen berupa motivasi dikarenakan setiap organisasi perlu adanya motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, serta pergantian

objek penelitian pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan judul

**“PENGARUH KEPERILAKUAN ORGANISASI, MOTIVASI KERJA, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH ( Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ) ”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu:

1. Apakah keperilakuan organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah ?
2. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah ?
3. Apakah pengendalian intenal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah ?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah ?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh variabel tersebut dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang mempunyai kewajiban untuk berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Keperilakuan Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Institusi  
Manfaat yang diberikan penulis bagi institusi dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu untuk menambah referensi pada perpustakaan IIB Darmajaya
2. Bagi Penulis  
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan yang luas terkait teori-teori yang ada
3. Bagi Mahasiswa  
Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi atau pun dapat dikembangkan guna penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa akuntansi untuk menambah pemahaman ilmu akuntansi.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian skripsi ini, pembahasan dan penyajian penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan berperilaku organisasi, motivasi, pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, kinerja pegawai, kerangka pikir dan hipotesis

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang variable penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistic di interprestasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisis simpulan dan saran yang dikemukakan oleh penulis dari hasil penelitian yang dilakukan untuk kemudian dapat digunakan sebagai masukan bagi pembaca pada umumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**